



Published by Yayasan Yetti Afrida Center Bengkulu

pISSN | eISSN

Vol. 1 No. 1 Oktober 2026 | Pages 43–56

<https://yettiafridacenter.com/tautan>

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal: Strategi Penguatan Nilai Moral, Toleransi, dan Solidaritas Sosial pada Generasi Muda

Meki Jihandra

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Email: mekijihandra@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract

Purpose: This article examines character education grounded in local wisdom as an approach to strengthening moral values, tolerance, and social solidarity among young people amid social change and digital culture.

Design/Methodology: The study employs a conceptual literature review and thematic synthesis of scholarship on character education, culturally responsive pedagogy, social learning, global citizenship, and cultural heritage. It does not claim to present survey findings or field observations.

Findings: The analysis suggests that character develops when role modelling, dialogue across differences, mutual cooperation, ethical reflection, and authentic assessment are implemented in an integrated manner. Local wisdom serves as a learning resource that should be examined critically and inclusively.

Practical Implications: Schools, families, young people, and communities can develop social service projects, consent-based cultural documentation, deliberative forums, and participatory assessments that respect diversity.

Originality/Value: The article proposes a Recognize–Discuss–Practice–Reflect–Evaluate framework to connect local cultural values with observable ethical behaviour.

Keywords: character education; local wisdom; moral values; tolerance; social solidarity; young people

Received: 05/09/2026

Accepted: 12/09/2026

Published: 12/10/2026

A. INTRODUCTION (PENDAHULUAN)

Pendidikan karakter menjadi penting ketika generasi muda menghadapi perubahan cepat dalam pola pergaulan, media komunikasi, dan praktik kehidupan sehari-hari. Di sekolah, interaksi tidak hanya berlangsung dalam ruang kelas, tetapi juga melalui grup percakapan, media sosial, organisasi pemuda, dan lingkungan tempat tinggal. Perubahan tersebut memperluas kesempatan membangun relasi namun juga menghadirkan persoalan penghormatan, ujaran merendahkan, polarisasi, dan melemahnya kesempatan bekerja bersama. Karena itu, pendidikan karakter tidak cukup diartikan sebagai hafalan nilai atau ketertiban administratif. Ia perlu dipahami sebagai pembentukan kebiasaan berpikir, merasakan, dan bertindak secara bertanggung jawab dalam hubungan dengan orang lain (Lickona, 1991).

Kearifan lokal menyediakan sumber belajar yang dekat dengan pengalaman peserta didik. Praktik musyawarah, saling membantu dalam kegiatan kampung, penghormatan kepada orang tua, seni tutur, dan tradisi kerja kolektif menyimpan peluang pendidikan moral yang tidak selalu hadir dalam buku ajar abstrak. Namun, kedekatan budaya tidak otomatis menjamin keadilan atau toleransi. Sebagian praktik dapat memuat hierarki, pengecualian, atau pembagian peran yang perlu dibahas secara kritis. Pembelajaran berbasis budaya seharusnya menghargai suara komunitas sekaligus membuka ruang penafsiran ulang ketika suatu kebiasaan merugikan anggota tertentu. Pandangan ini sejalan dengan pedagogi yang menempatkan pengalaman budaya sebagai sumber pembelajaran bermakna, bukan sebagai simbol dekoratif (Gay, 2018).

Artikel ini mengajukan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kearifan lokal dapat diterjemahkan menjadi pengalaman belajar moral yang relevan bagi generasi muda? Kedua, mekanisme apa yang memungkinkan pendidikan budaya memperkuat toleransi terhadap perbedaan dan solidaritas lintas kelompok? Ketiga, bagaimana keluarga, sekolah, dan masyarakat menyusun program serta evaluasi yang tidak berhenti pada acara seremonial? Tujuan kajian ialah menghasilkan kerangka konseptual yang dapat membantu pendidik menghubungkan nilai, praktik, dan refleksi. Karena belum dilakukan penelitian primer di komunitas tertentu, seluruh ilustrasi lokal dalam artikel ini merupakan kemungkinan penerapan yang masih perlu diuji melalui penelitian lapangan.

B. LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA)

1. Pendidikan Karakter sebagai Pembentukan Kebiasaan Etis

Pendidikan karakter menggabungkan pengetahuan tentang nilai, kepekaan terhadap akibat tindakan, dan kebiasaan bertindak yang konsisten. Lickona (1991) menyebut dimensi pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral sebagai komponen yang perlu dipertemukan. Seseorang dapat memahami definisi kejujuran namun tetap menyontek ketika tekanan sosial atau ketakutan gagal lebih kuat daripada komitmennya. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran harus menawarkan kesempatan menerapkan nilai dalam situasi nyata. Pembinaan karakter bukan penilaian terhadap kepribadian yang dianggap tetap, melainkan proses pendidikan yang dapat berubah melalui pengalaman, umpan balik, dan keteladanan.

Berkowitz dan Bier (2005) menekankan pentingnya program pendidikan karakter yang komprehensif dan didukung iklim sekolah. Program satu hari tanpa kelanjutan sulit diharapkan mengubah kebiasaan. Lingkungan yang menghargai siswa, menyediakan prosedur penyelesaian konflik, dan memperlihatkan integritas guru memberi contoh nyata mengenai konsekuensi nilai. Dalam pengertian ini, budaya institusi merupakan kurikulum tersembunyi yang dapat menguatkan atau membatalkan pesan resmi. Seruan toleransi menjadi tidak meyakinkan jika perbedaan pendapat dihukum secara tidak adil.

2. Kearifan Lokal dan Pendidikan Responsif Budaya

Kearifan lokal merujuk pada pengetahuan dan praktik yang berkembang dalam hubungan jangka panjang komunitas dengan lingkungan sosial maupun alamnya. Pengetahuan tersebut dapat berupa aturan hidup bersama, cerita lisan, cara menyelesaikan perselisihan, praktik berbagi, dan tata kelola sumber daya. Sebagai bahan pendidikan, nilai lokal perlu dipahami dalam konteks sosialnya. Geertz (1973) memperlihatkan pentingnya jaringan makna budaya, sementara UNESCO (2003) menegaskan peranan komunitas dalam menentukan serta mewariskan praktik budaya takbenda. Kedua perspektif ini mengingatkan bahwa nilai tidak cukup diterjemahkan menjadi slogan lepas dari para pelakunya.

Pedagogi responsif budaya menghubungkan pengetahuan yang dibawa siswa dari rumah dan masyarakat dengan materi sekolah (Gay, 2018). Hubungan ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan relevansi belajar, tetapi menuntut pendidik menolak stereotip tentang kelompok budaya. Tidak semua anak dari daerah yang sama memiliki pengalaman adat yang identik. Oleh karena itu, guru perlu memberi ruang bagi variasi pengalaman keluarga, migrasi, agama, dan kondisi ekonomi. Dalam kelas yang beragam, nilai lokal seharusnya menjadi jembatan dialog, bukan dasar menentukan siapa yang lebih asli atau lebih bermoral.

C. METHOD (METODE PENELITIAN)

Kajian ini menggunakan studi pustaka konseptual dan sintesis tematik interpretatif. Unit analisis berupa konsep pendidikan moral, pembelajaran sosial, budaya lokal, inklusi, toleransi, dan solidaritas yang dijelaskan dalam buku akademik, artikel ilmiah, serta dokumen pendidikan

internasional. Sumber teoretis klasik dipakai untuk memperjelas kerangka dasar, sedangkan laporan UNESCO dan OECD digunakan untuk menautkan pembahasan dengan tuntutan pendidikan kontemporer. Penelitian ini tidak menyatakan pernah melakukan wawancara, observasi kelas, atau pengukuran hasil intervensi.

Analisis ditempuh dalam empat tahap. Tahap pertama mengidentifikasi gagasan mengenai pembentukan karakter dan transmisi nilai sosial. Tahap kedua mengelompokkan mekanisme pendidikan menjadi keteladanan, dialog, praktik kolaboratif, refleksi, dan evaluasi. Tahap ketiga membandingkan manfaat dengan kemungkinan risiko, termasuk romantisasi tradisi, eksklusivitas kelompok minoritas, dan perubahan praktik budaya akibat komersialisasi. Tahap keempat menyusun kerangka implementasi yang dapat diuji melalui program sekolah maupun komunitas. Keabsahan argumen dijaga dengan membedakan klaim penulis, temuan literatur, dan contoh hipotetis.

Batasan kajian ialah tidak adanya data primer pada lokasi tertentu serta belum dilakukannya penelusuran sistematis dengan protokol telaah kuantitatif. Kerangka yang diusulkan berfungsi sebagai panduan desain dan pertanyaan penelitian, bukan bukti kausal bahwa satu kegiatan budaya pasti menaikkan toleransi. Uji lebih lanjut memerlukan indikator perilaku, persetujuan peserta, observasi yang etis, dan perbandingan konteks sosial yang berbeda. Perhatian pada keragaman ini diperlukan agar strategi tidak disalin begitu saja dari satu daerah kepada daerah lain.

D. RESULTS AND DISCUSSION (HASIL DAN PEMBAHASAN)

1. Kearifan Lokal sebagai Sumber Penalaran Moral

Cerita daerah, peribahasa, dan pengalaman musyawarah dapat menghadirkan dilema moral yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Cerita tentang pembagian hasil kerja, misalnya, dapat dijadikan bahan menimbang kejujuran, hak anggota, dan tanggung jawab kepada orang yang tidak hadir. Pendekatan ini lebih bermakna bila siswa diminta menilai alasan di balik suatu keputusan, bukan hanya menentukan tokoh baik dan buruk. Nucci dan Narvaez (2008) menunjukkan pentingnya pendidikan moral yang memperhatikan penalaran sekaligus konteks sosial. Nilai lokal kemudian menjadi pintu masuk untuk bertanya apa yang adil dan mengapa.

Penggunaan tradisi dalam kelas perlu menghindari dua penyederhanaan. Pertama, tidak semua kebiasaan lama harus dianggap benar semata karena diwariskan. Kedua, tidak semua perubahan modern berarti kehilangan moralitas. Pendidikan yang reflektif memungkinkan siswa mendiskusikan ketegangan antara penghormatan terhadap orang tua dan hak mengemukakan pendapat, antara loyalitas kelompok dan keterbukaan kepada pendatang, serta antara gotong royong dan pembagian kerja yang setara. Hasil yang diharapkan ialah kemampuan memberi alasan etis sambil memahami posisi orang lain. Dengan demikian, budaya lokal diperlakukan sebagai sumber dialog yang hidup, bukan kumpulan jawaban yang tidak boleh diperiksa.

2. Keteladanan dalam Keluarga, Sekolah, dan Komunitas

Karakter berkembang melalui pengulangan interaksi yang memberi contoh nyata. Anak belajar mengenai tanggung jawab ketika anggota keluarga menepati janji, guru memberi penilaian secara adil, dan pengurus komunitas mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Bronfenbrenner (1979) menegaskan bahwa perkembangan individu berkaitan dengan sistem lingkungan yang saling memengaruhi. Karena itu, program sekolah akan lebih kuat ketika keluarga memahami tujuan yang sama dan komunitas menyediakan ruang praktik. Bila nilai yang diajarkan berbeda tajam dari contoh yang sehari-hari terlihat, siswa menghadapi pesan yang bertentangan dan sulit menumbuhkan kepercayaan.

Keteladanan juga perlu dilihat dalam konteks digital. Mengingatkan siswa agar tidak menyebarkan informasi yang merendahkan kelompok lain tidak cukup apabila orang dewasa di sekitarnya melakukan hal serupa di media sosial. Penggunaan perangkat digital dapat dijadikan kesempatan mempraktikkan verifikasi informasi, penghormatan pada privasi, dan komunikasi santun. Guru dapat mendampingi siswa meninjau contoh pesan yang mudah disalahpahami lalu menyusun respons yang tidak mempermalukan pengirimnya. Aktivitas tersebut menghubungkan nilai moral dengan keterampilan berinteraksi dalam situasi mutakhir tanpa mengandaikan bahwa generasi muda identik dengan masalah etika.

3. Toleransi sebagai Kompetensi Dialog Antarperbedaan

Toleransi bukan sekadar membiarkan orang lain hadir di lingkungan yang sama. Ia memerlukan kesediaan mendengar, membedakan kritik gagasan dari serangan identitas, dan menerima bahwa praktik sosial dapat beragam. Pendidikan kewargaan global UNESCO (2015) mengaitkan pembelajaran dengan penghormatan hak, keberagaman, dan tanggung jawab bersama. Di sekolah, toleransi dapat dilatih melalui diskusi berbasis aturan yang disepakati bersama, kerja tim lintas pertemanan, dan penanganan konflik yang memberi kesempatan setara bagi pihak terkait. Peserta didik harus mengetahui bahwa menolak diskriminasi tidak sama dengan meniadakan perbedaan pendapat.

Kearifan lokal menawarkan contoh tata cara berdialog, namun tidak seharusnya diperlakukan sebagai model yang seragam bagi seluruh komunitas. Beberapa bentuk musyawarah menekankan pencarian mufakat; bentuk lainnya memberi ruang luas bagi perwakilan tokoh tertentu. Pendidik perlu menanyakan siapa yang bisa berbicara, suara siapa yang terlewat, dan bagaimana keberatan ditangani. Dengan mengkaji proses, siswa belajar bahwa toleransi membutuhkan prosedur yang adil. Diskusi tentang suatu keputusan kampung dapat dilanjutkan dengan simulasi forum pemuda, di mana perwakilan kelompok berbeda bergiliran menyampaikan kebutuhan dan mencari solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Solidaritas Sosial melalui Praktik Gotong Royong

Gotong royong dapat menjadi pembelajaran solidaritas ketika anggota komunitas bekerja bersama untuk tujuan yang dianggap penting. Namun, pekerjaan bersama bukan jaminan kebersamaan yang adil. Jika tugas berat selalu dibebankan kepada kelompok tertentu dan suara mereka diabaikan, kegiatan mungkin memelihara ketimpangan. Putnam (2000) membedakan modal sosial yang mengikat kelompok dekat dan yang menjembatani hubungan lebih luas. Perbedaan ini berguna untuk menganalisis apakah kegiatan pemuda hanya memperkuat lingkaran pertemanan lama atau membuka kerja sama dengan warga yang berlatar belakang berbeda.

Proyek layanan sosial dapat merangkum unsur perencanaan, kerja bersama, evaluasi, dan refleksi. Siswa dapat menyusun program kebersihan lingkungan, pendampingan belajar,

pengumpulan buku layak pakai, atau dukungan bagi warga rentan berdasarkan kebutuhan yang ditentukan melalui dialog. Mereka perlu menyepakati peran, mencatat keputusan, dan mengevaluasi apakah bantuan benar-benar dihargai penerimanya. Dengan model ini, solidaritas tidak diposisikan sebagai belas kasihan sepihak, melainkan hubungan setara yang memperhitungkan martabat, kemandirian, dan suara pihak yang didampingi.

5. Pembelajaran Lintas Generasi dan Pewarisan Nilai

Kegiatan bersama tokoh budaya, pengrajin, pekerja sosial, dan orang tua dapat mempertemukan pengetahuan praktis dengan pertanyaan generasi muda. Pelaku tradisi dapat menjelaskan alasan dibalik aturan kerja, pembagian tanggung jawab, atau cerita tentang penyelesaian konflik; peserta didik kemudian membandingkannya dengan tantangan masa kini. UNESCO (2003) menempatkan transmisi antargenerasi sebagai bagian penting perlindungan warisan budaya takbenda. Sekolah dapat merancang wawancara sejarah lisan atau kunjungan belajar dengan persetujuan narasumber dan aturan mengenai materi yang tidak boleh direkam untuk konsumsi publik.

Hubungan lintas generasi idealnya berlangsung dua arah. Generasi muda dapat membantu membuat arsip digital, sedangkan narasumber memberikan pengetahuan mengenai konteks, etika, dan batas penggunaannya. Jika dialog hanya meminta anak mengulang praktik lama tanpa ruang bertanya, kesempatan berpikir kritis berkurang. Sebaliknya, ketika seluruh tradisi dijadikan konten singkat demi popularitas, nuansa sosial dapat hilang. Keterampilan mendokumentasikan budaya dengan menghormati pemilik pengetahuan menjadi bagian pendidikan karakter, karena siswa mempraktikkan kejujuran atribusi, izin, dan tanggung jawab publik.

6. Pendidikan Moral dan Pengelolaan Konflik

Konflik sehari-hari memberi kesempatan belajar yang penting. Perselisihan pembagian tugas, ejekan identitas daerah, atau perbedaan pilihan organisasi dapat dijadikan kasus untuk melatih pengenalan emosi dan pemecahan masalah. Noddings (2005) mengingatkan dimensi kepedulian dalam pendidikan moral: individu perlu melihat orang lain sebagai manusia dengan kebutuhan dan pengalaman nyata. Guru dapat meminta siswa memetakan fakta, dampak pada pihak yang terlibat,

pilihan penyelesaian, dan alasan untuk memilih tindakan yang memulihkan hubungan tanpa menutupi ketidakadilan.

Pendekatan restoratif tidak berarti seluruh pelanggaran cukup diselesaikan melalui permintaan maaf. Sekolah tetap membutuhkan prosedur perlindungan bagi korban, batas perilaku yang jelas, serta mekanisme pelaporan yang aman. Refleksi moral lebih kuat ketika siswa memahami perbedaan antara kesalahan tidak sengaja, konflik setara, dan tindakan intimidasi berulang. Dalam kasus yang berisiko, perlindungan keselamatan perlu didahulukan. Pendidikan karakter dengan demikian menghubungkan empati, akuntabilitas, dan ketegasan terhadap perilaku diskriminatif tanpa mempermalukan peserta didik di hadapan umum.

7. Peran Sekolah sebagai Ekosistem Budaya Etis

Budaya sekolah mencakup cara pimpinan membuat keputusan, guru menanggapi keberatan, dan siswa memperoleh akses berpartisipasi. Mata pelajaran tentang toleransi sulit memberikan pengaruh berarti apabila kebijakan tidak transparan atau perlakuan terhadap kelompok tertentu tidak adil. Berkowitz dan Bier (2005) menempatkan pendidikan karakter dalam pendekatan menyeluruh yang melibatkan relasi dan pengelolaan institusi. Karena itu, perubahan perlu dimulai dari pemetaan pengalaman nyata siswa: kapan mereka merasa dihargai, kapan merasa tidak aman, dan bagaimana keputusan yang menyangkut mereka dijelaskan.

Sekolah dapat membangun forum kelas yang melibatkan peserta didik dalam menyusun kesepakatan diskusi, aturan kerja kelompok, dan langkah pelaporan penghinaan. Perwakilan siswa hendaknya dipilih dengan cara yang membuka kesempatan beragam latar. Dalam kegiatan kebudayaan, penilaian tidak semestinya hanya diberikan kepada pertunjukan terbaik, tetapi juga kepada kualitas kerja tim dan penghormatan terhadap narasumber. Indikator proses membantu mengurangi persaingan simbolik yang justru mengikis solidaritas. Kegiatan budaya menjadi pendidikan karakter ketika para peserta menyadari alasan etis di balik tindakan yang dilaksanakan.

8. Keluarga dan Komunitas sebagai Mitra yang Setara

Keluarga memiliki peran penting dalam membiasakan penghormatan, kepedulian, dan tanggung jawab. Namun, latar keluarga berbeda-beda, sehingga sekolah tidak boleh menganggap seluruh

orang tua memiliki waktu, sumber daya, atau pandangan budaya yang sama. Kemitraan sebaiknya menyediakan cara keterlibatan yang fleksibel: diskusi singkat, proyek rumah sederhana, atau pertemuan komunitas yang jadwalnya disepakati. Pendekatan ekologis Bronfenbrenner (1979) membantu menjelaskan bahwa kualitas hubungan antarlingkungan turut membentuk pengalaman belajar. Penyampaian pesan yang konsisten lebih berguna daripada memindahkan seluruh beban pendidikan karakter kepada keluarga.

Keterlibatan komunitas juga memerlukan persetujuan dan pembagian manfaat. Tokoh adat atau pekerja budaya yang menjadi narasumber berhak mengetahui bagaimana pengalaman mereka ditampilkan serta memperoleh penghargaan yang layak. Sekolah perlu menghindari penggunaan praktik sakral sebagai tontonan tanpa memahami konteksnya. Keberhasilan program tidak hanya dihitung dari banyaknya kegiatan, tetapi juga kualitas relasi dengan komunitas, keberlanjutan kerja sama, dan munculnya kesempatan belajar yang saling menguntungkan. Kearifan lokal diperlakukan sebagai pengetahuan hidup milik masyarakat, bukan bahan mentah untuk memenuhi target dokumentasi.

9. Identitas Lokal dan Kewargaan dalam Masyarakat Majemuk

Identitas budaya dapat memberikan rasa memiliki yang mendukung kepercayaan diri dan tanggung jawab. Namun, identitas juga dapat menjadi batas yang menutup kesempatan bertemu orang lain bila dibangun melalui anggapan bahwa hanya satu kelompok memiliki nilai baik. Banks (2015) menempatkan pendidikan multikultural sebagai upaya memperluas keadilan dan partisipasi dalam masyarakat beragam. Dalam konteks Indonesia, pengenalan tradisi daerah dapat disandingkan dengan cerita dari kelompok lain, sehingga siswa melihat persamaan aspirasi serta perbedaan tata cara tanpa harus menempatkannya dalam hierarki.

Proyek perbandingan cerita, lagu, atau tradisi berbagi lintas daerah dapat diarahkan pada pertanyaan etis: nilai apa yang ingin dijaga, bagaimana warga baru dilibatkan, dan apakah praktik masih adil bagi semua peserta? Dengan kegiatan semacam ini, kebanggaan lokal tidak dipisahkan dari kewargaan yang menghormati kebinekaan. Pengalaman belajar perlu memberi kesempatan siswa mengoreksi stereotip dan menyadari bahwa identitas individu berlapis. Orang dapat

menghargai bahasa daerah, menjalani peran sebagai warga nasional, dan membangun persahabatan lintas budaya pada saat yang sama.

10. Literasi Digital dan Keberlanjutan Nilai

Kearifan lokal dapat diperkenalkan melalui rekaman cerita, peta budaya, dan arsip audio visual yang dikelola secara etis. Namun, jumlah tontonan bukan indikator langsung pendidikan karakter. Konten viral dapat memperluas pengenalan tradisi, tetapi mudah kehilangan konteks atau menghadirkan simbol budaya sebagai hiburan semata. Siswa perlu belajar meminta izin sebelum merekam, mencantumkan pemilik pengetahuan, dan memisahkan materi publik dari praktik yang dibatasi komunitas. Kegiatan ini menghubungkan literasi digital dengan kejujuran, penghormatan, dan perlindungan hak warga.

Tantangan lain muncul ketika komunikasi di ruang digital mempercepat penilaian berdasarkan potongan video atau pesan pendek. Pembelajaran karakter dapat melatih jeda reflektif sebelum membagikan informasi, pencarian sumber pembandingan, dan pembuatan komentar yang mengkritik tindakan tanpa merendahkan identitas seseorang. Prinsip kewargaan global dan penghargaan keberagaman dari UNESCO (2015) memberi arah bagi pembelajaran tersebut. Guru sebaiknya menilai kualitas argumentasi dan kesadaran siswa tentang dampak sosial unggahan, bukan menuntut keseragaman pendapat dalam semua persoalan.

11. Model Kenali–Dialogkan–Praktikkan–Refleksikan–Evaluasi

Berdasarkan sintesis, artikel ini menawarkan lima langkah yang saling berhubungan. Kenali berarti mengidentifikasi nilai dan praktik lokal serta pihak yang memiliki pengetahuan. Dialogkan berarti membahas makna, relevansi, dan kemungkinan ketidakadilan bersama berbagai suara. Praktikkan berarti menerapkan nilai dalam aktivitas yang memberi manfaat sosial terukur. Refleksikan berarti memeriksa pengalaman, emosi, konflik, dan alasan tindakan. Evaluasi berarti menilai perubahan perilaku dan memperbaiki desain program. Model ini merupakan usulan konseptual yang masih memerlukan pembuktian empiris sebelum dinyatakan efektif.

Dalam implementasi, guru dapat memilih satu tema, misalnya kerja bersama menjaga ruang publik. Peserta didik menelusuri praktik saling membantu di wilayahnya, berdialog dengan warga

berbeda usia, menyusun proyek inklusif, mencatat keputusan, lalu melakukan refleksi tentang tanggung jawab dan pembagian kerja. Penilaian dapat memadukan rubrik perilaku, jurnal refleksi, observasi guru, dan masukan komunitas. Pengukuran perlu menghindari penilaian kepribadian permanen berdasarkan satu peristiwa. Fokusnya adalah bukti proses belajar yang dapat digunakan untuk memberi umpan balik dan kesempatan memperbaiki tindakan.

12. Evaluasi Pendidikan Karakter yang Bertanggung Jawab

Pendidikan karakter sering mengalami kesulitan asesmen karena nilai abstrak tidak sama dengan perilaku yang langsung dapat diamati. Sikap toleran, misalnya, tidak cukup dinilai dari jawaban siswa bahwa semua orang harus dihargai. Guru dapat mencatat apakah ia memberi giliran berbicara, menggunakan alasan tanpa penghinaan, dan bersedia memperbaiki kesalahpahaman. Solidaritas dapat diamati dari partisipasi yang bertanggung jawab dan kesediaan mendengar kebutuhan penerima bantuan. Namun indikator tersebut tidak boleh dipisahkan dari kesempatan yang dimiliki siswa; keterbatasan waktu atau kondisi keluarga dapat memengaruhi intensitas keterlibatan.

Penilaian sebaiknya bersifat formatif dan menggabungkan lebih dari satu sumber bukti. Refleksi tertulis, penilaian diri, pengamatan tim, serta umpan balik komunitas dapat saling melengkapi. Hattie (2009) menunjukkan pentingnya umpan balik terhadap proses pembelajaran, tetapi penggunaan rubrik moral memerlukan kehati-hatian agar tidak menjadi alat memberi label buruk kepada anak. Sekolah perlu menjaga privasi data dan menghindari publikasi peringkat karakter. Evaluasi ditujukan untuk meningkatkan mutu lingkungan belajar, bukan menghukum siswa karena belum mencapai citra kepribadian ideal.

13. Implikasi Kebijakan dan Agenda Penelitian Lanjutan

Pada tingkat kebijakan sekolah, pendidikan berbasis kearifan lokal perlu diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran rutin dan tata kelola, bukan hanya peringatan hari budaya. Sekolah dapat mengalokasikan waktu proyek, mengundang mitra komunitas, menyediakan perlindungan untuk peserta dengan kebutuhan berbeda, serta mendukung pengembangan kompetensi guru. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dari UNESCO (2017) memberi contoh bagaimana nilai dan tindakan dapat dihubungkan dengan persoalan nyata yang memerlukan tanggung jawab lintas

generasi. Program perlu menyeimbangkan tujuan budaya, sosial, dan pendidikan agar tidak bergeser menjadi festival semata.

Penelitian empiris berikutnya dapat membandingkan sekolah di wilayah urban dan perdesaan, menganalisis variasi dukungan keluarga, serta menguji hubungan antara iklim sekolah dan perilaku kolaboratif. Rancangan campuran memungkinkan peneliti menggabungkan survei pengalaman siswa dengan wawancara dan observasi praktik. Penelitian longitudinal diperlukan untuk menilai apakah pembiasaan bertahan setelah suatu proyek selesai. Agar kesimpulan kausal layak dibuat, perlu desain pembandingan, pengukuran awal dan akhir, serta perhatian pada faktor pengganggu seperti kondisi sosial ekonomi dan pengalaman organisasi peserta.

Keterbatasan lain adalah potensi dominasi satu versi budaya ketika sekolah hanya melibatkan tokoh tertentu. Peneliti perlu membuka ruang bagi perempuan, kelompok muda, pendatang, dan warga yang praktik budayanya kurang terlihat. Persetujuan yang sah, anonimisasi bila diperlukan, dan hak narasumber menarik materi sensitif merupakan bagian etika riset. Dengan cara ini, usaha mengajarkan toleransi juga terlihat dalam metode memperoleh pengetahuan. Pendidikan karakter berbasis budaya menjadi lebih dapat dipercaya ketika proses perancangannya sendiri mencerminkan penghormatan, keadilan, serta kerja sama.

E. CONCLUSION (KESIMPULAN)

Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal berpotensi memperkuat nilai moral, toleransi, dan solidaritas sosial apabila nilai budaya diterjemahkan menjadi pengalaman belajar yang reflektif serta inklusif. Nilai tidak otomatis diwariskan melalui simbol atau acara adat; ia dipelajari melalui contoh, dialog, keputusan, pembagian tanggung jawab, dan penyelesaian persoalan nyata. Karena itu, program pendidikan perlu menghubungkan pengetahuan mengenai tradisi dengan keterampilan mendengar, memberi alasan etis, dan bekerja bersama orang yang berbeda.

Kerangka Kenali–Dialogkan–Praktikkan–Refleksikan–Evaluasi menghubungkan sumber pengetahuan lokal dengan pelaksanaan program dan bukti perubahan perilaku. Sekolah berperan membangun iklim yang adil, keluarga memberi penguatan melalui kebiasaan sehari-hari, dan komunitas menyediakan konteks belajar nyata. Kebanggaan budaya tidak boleh digunakan untuk

menutup kritik terhadap praktik yang mengecualikan pihak tertentu. Toleransi membutuhkan ruang dialog yang aman, sedangkan solidaritas memerlukan pembagian peran serta manfaat yang bertanggung jawab.

Kajian ini terbatas sebagai sintesis konseptual tanpa pengumpulan data primer. Usulan model belum membuktikan besaran dampak pada kelompok peserta tertentu dan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh tradisi Indonesia. Penelitian lanjutan perlu menguji proses serta hasil program pada konteks yang beragam. Dengan evaluasi yang etis, partisipatif, dan berkelanjutan, kearifan lokal dapat menjadi sumber pendidikan karakter yang relevan bagi generasi muda sekaligus menghormati hak masyarakat pemilik tradisi.

F. BIBLIOGRAPHY (DAFTAR PUSTAKA)

- Banks, J. A. (2015). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching* (6th ed.). Routledge.
- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2005). *What works in character education: A research-driven guide for educators*. Character Education Partnership.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Durkheim, E. (1961). *Moral education: A study in the theory and application of the sociology of education*. Free Press. (Original work published 1925).
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Gay, G. (2018). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice* (3rd ed.). Teachers College Press.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. Basic Books.
- Hattie, J. (2009). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge.
- Kohlberg, L. (1984). *The psychology of moral development: The nature and validity of moral stages*. Harper & Row.

- Ladson-Billings, G. (1995). Toward a theory of culturally relevant pedagogy. *American Educational Research Journal*, 32(3), 465–491. <https://doi.org/10.3102/00028312032003465>
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Noddings, N. (2005). *The challenge to care in schools: An alternative approach to education* (2nd ed.). Teachers College Press.
- Nucci, L. P., & Narvaez, D. (Eds.). (2008). *Handbook of moral and character education*. Routledge.
- OECD. (2018). *The future of education and skills: Education 2030*. OECD Publishing.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. <https://ich.unesco.org/en/convention>
- UNESCO. (2015). *Global citizenship education: Topics and learning objectives*. UNESCO.
- UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning objectives*. UNESCO.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.